

**RENCANA STRATEGIS
R E N S T R A
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023-2026**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan. Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun ke depan, penyusunan RENSTRA ini berlandaskan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini dirumuskan dengan tahapan, tata cara, serta pendekatan yang diatur dalam peraturan perundangan dalam rangka menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas sesuai tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang sejalan dengan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dirancang sebagai dokumen perencanaan yang mampu memberikan arahan, yang memudahkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Renstra Sekretariat DPRD ini dimaksudkan sebagai pegangan umum perencanaan dalam rangka menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Disamping sebagai pedoman dalam perencanaan, Renstra ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, sehingga akan mendukung **PENINGKATAN KUALITAS**

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN yang pada akhirnya akan mendukung **TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN.**

Diharapkan RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini dapat dijadikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat sehingga akan terwujud Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara paripurna.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing untuk mewujudkan masyarakat Lampung Barat yang adil, makmur dan sejahtera.

Liwa, April 2022

PLT. SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



PIRWAN, SE., MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690310 199803 1 006

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	7
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2. Penentuan Isu-isu Strategis	37

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan	39
4.2. Sasaran	39

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi	41
5.2. Arah Kebijakan	42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN	48
------------------------	-----------

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

80

BAB VIII PENUTUP

82

Lampiran

Lampiran I POHON KINERJA

Lampiran II CASCADING

Lampiran III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting. Formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dituangkan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Keberadaan perencanaan di dalam sebuah organisasi secara umum dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada pasal 11 ayat 3 rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung

pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Dokumen perencanaan tersebut adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan dari Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah harus mengacu sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tertentu, yang memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra disusun untuk mengoptimalkan pemanfaatan semua potensi sumber daya dan peluang yang ada secara berkelanjutan berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang akan dihadapi dalam pembangunan selama lima tahun kedepan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjalankan fungsi pelayanan kepada DPRD diwajibkan menyusun Renstra. Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2023-2026 yang tersusun dapat dijadikan sebagai langkah penyalarsan tujuan, sasaran dan skala prioritas program dan kegiatan dalam Rancangan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul di Sekretariat DPRD selama tahun 2023-2026.

Oleh karena itu, dokumen Renstra ini berguna sebagai acuan dan arahan bagi semua jajaran di lingkup Sekretariat DPRD dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan periode 2023-2026 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait. Dan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Renstra Sekretariat DPRD ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan disusun untuk mewujudkan komitmen dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan Renstra yang tersusun akan selalu terarah dan semakin mempertegas tujuan yang harus di wujudkan oleh setiap aparatur pemerintah yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, adalah:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 No.14, Tambahan Lembaran Daerah Lampung Barat No. 439);
16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, adalah :

1. Sebagai landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada setiap tahun anggaran selama periode 2023-2026;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Perangkat Daerah;
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah;
5. Memberikan arah dan pedoman dalam pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama periode 2023-2026;
2. Menjaga konsistensi dari dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan pemilihan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun;
3. Sebagai arahan, pedoman, acuan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural dan staf dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, partisipatif dan tepat sasaran;
4. Memudahkan pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat DPRD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan
- 4.2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

Lampiran

Lampiran I POHON KINERJA

Lampiran II CASCADING

Lampiran III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dibentuk terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyelenggaraan penyerapan aspirasi dan informasi, kehumasan dan keprotokolan DPRD;
- e. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- f. penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi produk hukum DPRD;
dan
- g. penyelenggaraan penyusunan produk hukum DPRD dan bahan kajian rancangan peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD;

b. Bagian Umum dan Kehumasan membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2. Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
3. Jabatan Fungsional.

c. Bagian Keuangan

Membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Membawahi kelompok Jabatan Fungsional.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

SEKRETARIS DPRD

Untuk menyelenggarakan fungsi Sekretariat DPRD, Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin dan mengordinasikan kegiatan Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi :

1. melaksanakan pengordinasian, integrasi, sinkronisasi dan fasilitasi rapat-rapat DPRD;
2. menyusun program dan rencana pelaksanaan urusan rumah tangga dan keuangan DPRD;
3. menyelenggarakan kegiatan tata usaha dan kepegawaian;
4. menyelenggarakan layanan administrasi, sarana kehumasan dan keprotokolan;
5. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas;

6. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan diambil dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan hubungan kemasyarakatan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN UMUM DAN KEHUMASAN

Kepala Bagian Umum dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha umum, merencanakan dan mengadakan kebutuhan barang DPRD dan rumah dinas serta melaksanakan urusan rumah tangga, melaksanakan kegiatan kehumasan, dokumentasi dan keprotokolan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bagian Umum dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi :

1. penyelenggaraan ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
4. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
7. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
9. penyelenggaraan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN KEUANGAN

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, mengelola administrasi keuangan serta menyusun laporan keuangan untuk keperluan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

1. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja tahunan program kerja tahunan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan;
2. pelaksanaan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan;
3. perumusan kebijakan pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
4. penghimpunan serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan program dan anggaran dan pengelolaan keuangan;
5. pelaksanaan dan pengordinasian pelaksanaan penatausahaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
6. pelaksanaan dan pengoordinasian pengumpulan bahan penyusunan dan perhitungan penggunaan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
7. pengelolaan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan rapat, keperluan

untuk kelancaran persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

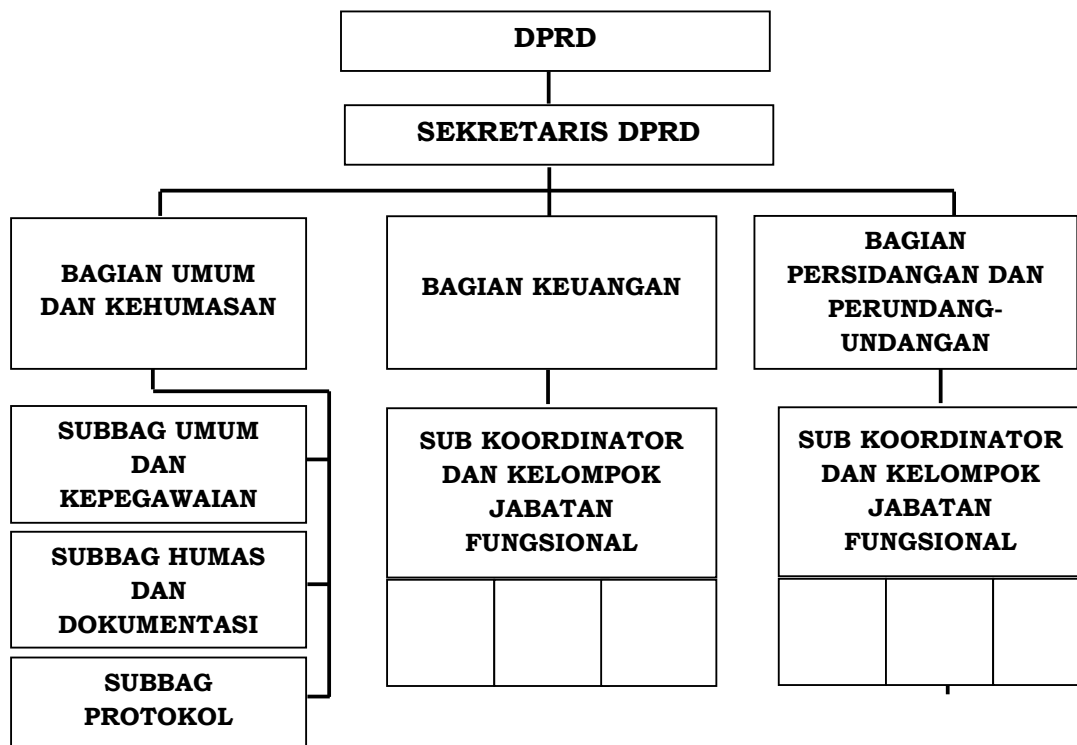
1. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
2. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
3. pelaksanaan fasilitasi penyusunan naskah akademik dan draf raperda inisiatif;
4. pelaksanaan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengumpulan bahan penyapan draf raperda Inisiatif;
6. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
7. penyusunan risalah rapat;
8. pengkoordinasian pembahasan raperda;
9. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris masalah (DIM);
10. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
11. pelaksanaan kegiatan penyusunan, pengagendaan, persidangan (rapat) dan pelaksanaan persidangan (rapat) serta membuat risalah dan mendokumentasikan hasilnya;
12. pelaksanaan kegiatan pelayanan kebutuhan untuk melancarkan persidangan (rapat) baik rapat-rapat biasa maupun rapat paripurna;
13. pelaksanaan penyusunan produk hukum daerah lingkungan Sekretariat DPRD;
14. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi untuk kelancaran tugas staf ahli DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada pimpinan; dan

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

16. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh 31 orang PNS dari Sekretaris Dewan, Kepala Bagian,

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Kepala Sub Bagian, Pejabat Fungsional sampai dengan staf, dengan latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan yang berbeda beda.

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan adalah seperti pada Tabel :

Tabel 2.1

KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Pendididikan	Jumlah	Komposisi(%)
1.	SLTA	2 Orang	6,45
2.	Sarjana Muda	0 Orang	0,00
3.	Sarjana / S1	23 Orang	70,20
4.	Pasca Sarjana / S2	6 Orang	19,35
	Jumlah	31 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepagawaian, 2022

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 berdasarkan jenis kelamin adalah seperti pada Tabel :

Tabel 2.2

KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Komposisi (%)
1.	Pria	21 Orang	67,75
2.	Wanita	10 Orang	32,25
	Jumlah	31 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2022

Sedangkan komposisi Pegawai Sekretariat DPRD pada Tahun 2022 berdasarkan Golongan adalah seperti pada Tabel ini :

Tabel 2.3

KOMPOSISI PEGAWAI SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT BERDASARKAN GOLONGAN

No.	Golongan	Jumlah	Komposisi (%)
-----	----------	--------	---------------

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

1.	Golongan IV	3 Orang	9,68
2.	Golongan III	26 Orang	83,87
3.	Golongan II	2 Orang	6,45
Jumlah		31 Orang	100,00

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2022.

Pengisian formasi jabatan struktural pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini menunjukkan keadaan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Dewan, Eselon II/b terisi;
- b. 3 (tiga) Kepala Bagian, Eselon III/a terisi;
- c. 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, Eselon IV/b terisi.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda empat, roda dua, bangunan gedung, perlengkapan dan peralatan kantor.

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

No	Nama Aset	Jumlah	Keterangan
1.	Bangunan Gedung Sekretariat DPRD	1 Unit	Kondisi Baik
2.	Bangunan Gedung Kantor Fraksi	1 Unit	Kondisi Baik
3.	Bangunan Gedung Kantor Komisi	1 Unit	Kondisi Baik
4.	Bangunan Gedung Mushola	1 Unit	Kondisi Baik
5.	Bangunan Gedung Ruang Sidang	1 Unit	Kondisi Baik
6.	Rumah Jabatan Ketua DPRD	1 Unit	Kondisi Baik
7.	Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD	2 Unit	Kondisi Baik
8.	Kendaraan Jabatan Ketua DPRD	1 Unit	Kondisi Baik
9.	Kendaraan Jabatan Wakil Ketua DPRD	2 Unit	Kondisi Baik
10.	Kendaraan Operasional Sekretariat DPRD	6 Unit	Kondisi Baik
11.	Sepeda Motor KLX	18 Unit	Kondisi Baik
12.	Personal Kompute	3 Unit	Kondisi Baik
13.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9 Unit	Kondisi Baik
14.	Lemari Besi/Metal	1 Unit	Kondisi Baik
15.	Lemari Kayu	1 Unit	Kondisi Baik
16.	Lemari Kaca	1 Unit	Kondisi Baik
17.	Rak Besi/Metal	1 Unit	Kondisi Baik

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

18.	Rak Kayu	8 Unit	Kondisi Baik
19.	Filling Cabinet Besi/Metal	3 Unit	Kondisi Baik
20.	Brankas	1 Unit	Kondisi Baik
21.	Meja Kayu	25 Unit	Kondisi Baik
22.	Meja Rapat	50 Unit	Kondisi Baik
23.	Meja Tulis	80 Unit	Kondisi Baik
24.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 Unit	Kondisi Baik
25.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 Unit	Kondisi Baik
26.	Meja Komputer	6 Unit	Kondisi Baik
27.	Kursi Kayu	35 Unit	Kondisi Baik
28.	Kursi Rapat	50 Unit	Kondisi Baik
29.	Kursi Putar	60 Unit	Kondisi Baik
30.	Kursi Lipat	100 Unit	Kondisi Baik
31.	Kursi Biasa	100 Unit	Kondisi Baik
32.	AC	10 Unit	Kondisi Baik
33.	Dispenser	6 Unit	Kondisi Baik
34.	Televisi	5 Unit	Kondisi Baik
35.	Camera Digital	1 Unit	Kondisi Baik
36.	Camera Video	1 Unit	Kondisi Baik
37.	Tripod Camera	1 Unit	Kondisi Baik
38.	Lensa Camera	1 Unit	Kondisi Baik
39.	Handy Cam	1 Unit	Kondisi Baik

Sumber : Pengurus Barang Sekretariat DPRD Kab. Lampung Barat

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah memfasilitasi seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Barat (supporting), yang meliputi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, ditetapkan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan indikator Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berdasarkan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2017-2022 tersebut, seperti dalam tabel berikut:

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Barat Periode 2017-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat diatas, Sekretariat DPRD menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2022, yaitu : Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat, dengan indikator yaitu : Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD dengan Target dari tahun 2018-2022 adalah **BAIK** dan terealisasi dari tahun 2018-2022 adalah **BAIK** atau **100,00%** untuk setiap tahunnya.

Berdasarkan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat pada renstra Tahun 2017-2022 diatas, menunjukkan bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat terlaksana dengan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam administrasi maupun pelaksanaannya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat antara lain ketersediaan anggaran, adanya koordinasi antar alat kelengkapan dewan yang meningkat, tersedianya fasilitas rapat antara lain ruang rapat dan ruang kerja yang representatif, materi rapat, risalah rapat dan fasilitasi kunjungan baik dari sisi keuangan, jadwal kunjungan dan kegiatan lainnya guna melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai wakil rakyat.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD didukung oleh tersedianya anggaran yang relatif besar. Untuk periode 2018-2022, anggaran dan realisasi anggaran Sekretariat DPRD seperti pada tabel dibawah ini :

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2022

Sasaran Strategis	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Meningkatnya pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat	40,456,367,216	38,807,996,284	35,993,741,749	43.756.243.055	41,488,815,880	38,517,564,675	37,459,176,101	34,759,614,820	42.840.365.952	41,025,815,880	95,21%	96,53%	96,58%	97,91%	98,89%	5.04%	9.04%

Selama tahun 2018-2022, Sekretariat DPRD telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri dari 1 (satu) indikator. Dalam pelaksanaannya, indikator tersebut didukung oleh ketersediaan anggaran yang relatif besar.

Berdasarkan tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat diatas dapat diketahui bahwa pada beberapa tahun mengalami penurunan anggaran. Pada tahun 2019 mengalami penurunan anggaran dari tahun 2018 sebesar -4.08 %, tahun 2020 mengalami penurunan anggaran dari tahun 2019 sebesar -7.26%, tahun 2021 mengalami kenaikan anggaran yang relatif besar dari tahun 2020 sebesar 21,57%. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan anggaran sebesar -5.19 %. Penurunan anggaran ini salah satunya dikarenakan adanya pandemic Covid 19 pada tahun 2020 sehingga terapat kebijakan refocusing anggaran. Namun secara keseluruhan terdapat rata-rata kenaikan anggaran sebesar 5.04%.

Pada realisasi anggaran, selama lima tahun ini cukup tinggi. Pada tahun 2018 realisasi anggaran sebesar 95,21%, pada tahun 2019 sebesar 96,53%, pada tahun 2020 sebesar 96,58%, tahun 2021 sebesar 97,91% dan pada tahun 2022 sebesar 98,89 %. Sehingga dengan realisasi anggaran yang diatas 95,00% dapat dikatakan bahwa realisasi anggaran sudah cukup tinggi. Dengan rata-rata kenaikan realisasi anggaran sebesar 9.04%.

Realisasi anggaran yang relatif tinggi disebabkan beberapa faktor diantaranya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat dan adanya aparatur Sekretariat DPRD yang melaksanakan kegiatan dan pertanggungjawaban kegiatan dengan cukup baik.

Namun demikian, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat terus berusaha melakukan peningkatan kualitas kinerja pelayanan terhadap anggota DPRD.

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan pelayanan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dapat terlaksana dengan baik dan mampu terus menunjukkan progres pelaksanaan program sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat baik ditingkat pusat ataupun ditingkat daerah di era kebebasan berdemokrasi saat ini sangat dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dan aspiratif terhadap aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari terbitnya peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Selain penguatan dari sisi kelembagaan dan anggota Dewannya sendiri, kinerja anggota DPRD juga sangat didukung oleh kinerja Sekretariat DPRD. Karena kinerja Sekretariat DPRD yang baik akan sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Untuk itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan organisasi dalam hal ini Sekretariat DPRD.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, yaitu Strength/Kekuatan, Weakness/Kelemahan, Opportunity/Peluang dan Threat/Ancaman/Tantangan. Sehingga perlu adanya metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Barat, bisa digambarkan melalui peningkatan layanan kedewanan yang menjadi program Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya. Hal tersebut berpengaruh pada :

- 1 Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
- 2 Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi di atas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan

Menurut Analisis SWOT pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- a. Dukungan anggaran operasional yang cukup memadai dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
- b. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Sekretariat DPRD;
- c. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

- d. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD;

Kelemahan (Weakness):

- a. Masih rendahnya pemahaman aparatur Sekretariat DPRD tentang tugas pokok dan fungsinya;
- b. Kurangnya disiplin dan motivasi kerja aparatur;
- c. Tingginya frekwensi kerja insidentile;
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan atas peraturan perundangan dan penggunaan aplikasi;
- f. kurangnya kualitas/kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter serta yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.

2. Kondisi Eksternal yang terdiri atas tantangan dan peluang

Tantangan (Threat)

- a. Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya (tidak sesuai dengan rencana kerja DPRD);
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan DPRD;
- c. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan;
- d. Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD;
- e. Meningkatnya daya kritis masyarakat, yang menuntut pelayanan yang diberikan berjalan selalu baik dan sempurna. Hal ini dapat menurunkan semangat kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau anggota DPRD;

- f. Proses interaksi yang terlalu intens dan kedekatan yang berlebihan yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD.

Peluang (Opportunities)

- a. Dukungan kebijakan dan tingginya komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD;
- b. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD. Sehingga Sekretariat DPRD akan bekerja sebaik mungkin untuk memenuhi standar tersebut, yang pada akhirnya ini akan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD;
- c. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis. Sehingga Sekretariat DPRD harus memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD;
- d. Adanya potensi SDM Anggota DPRD yang dapat dikembangkan. Dengan seringnya anggota DPRD mengikuti kegiatan bimtek, workshop atau sosialisasi, diharapkan SDM anggota DPRD menjadi lebih berkompeten dan berwawasan yang diharapkan dapat ditularkan kepada aparatur Sekretariat DPRD sehingga dapat mendukung terciptanya SDM aparatur Sekretariat DPRD yang baik dan berkualitas yang dapat menunjang peningkatan kinerja Sekretariat DPRD;
- e. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya. Diharapkan aparatur Sekretariat DPRD dapat menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat DPRD;
- f. Adanya Infrastruktur yang cukup memadai dan dapat dikembangkan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya, secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Ketentuan tersebut merupakan tantangan bagi Sekretaris DPRD karena dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mensinergikan pelaksanaan tugas dan proses kebijakan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bermitra, sejajar dan harmonis.

Sesuai dengan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada DPRD, Sekretariat DPRD dituntut semakin cepat, tepat dan mampu meletakkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inilah yang menjadi permasalahan utama Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yakni **Belum Optimalnya Dukungan dan Fasilitas Sekretariat DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**. Hal tersebut muncul disebabkan antara lain karena :

1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
2. Belum optimalnya dukungan layanan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;
4. Masih rendahnya jangkauan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;

Tabel 3.1

Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya Dukungan dan Fasilitasi DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan	1. Masih rendahnya pemahaman aparatur Sekretariat DPRD tentang tugas pokok dan fungsinya. 2. Kurangnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah; 3. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kinerja Sekretariat DPRD.
		2. Belum optimalnya dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;	1. Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan oleh anggota DPRD. 2. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. 3. Kurangnya kompetensi dan kuantitas tenaga Legal Drafter yang tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas DPRD. 4. Penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

			belum diselesaikan dengan tepat waktu. 5. Pembahasan dan pengesahan kebijakan anggaran yang belum tepat waktu. 6. Pengawasan pelaksanaan jalannya fungsi pemerintah daerah yang belum teragendakan dengan baik.
		3. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;	1. Kurangnya optimalnya admin website DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang masuk melalui website DPRD. 2. Kurang optimalnya pelaksanaan reses sebagai salah satu cara penyerapan aspirasi masyarakat. 3. Kurangnya optimalnya kunjungan kerja dalam daerah yang dilakukan oleh DPRD.
		4. Masih rendahnya jangkauan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;	1. Kurangnya sosialisasi terkait adanya website DPRD dan media sosial DPRD lainnya seperti instgram sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD. 2. Kurangnya distribusi majalah “Legislasi” sebagai media cetak yang berisi informasi kegiatan DPRD. 3. Kurangnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD yang menangani masalah dokumentasi dan kehumasan.

Telaah Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, ditetapkan 5 (lima) tujuan yaitu :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
Dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Pendapatan Perkapita
 - b. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
2. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.
Dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.
3. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana.
Dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
 - b. Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
 - c. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana
4. Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan.
Dengan sasaran :
 - a. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai.
Dengan sasaran :
 - a. Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
 - b. Meningkatkan pemajuan kebudayaan dan Pelestarian cagar budaya

Dari tujuan dan sasaran yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD mempunyai tugas untuk ikut mendukung pencapaian Tujuan ke 4 (empat) yaitu:

“TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN” dengan sasaran **“MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN”**.

Pernyataan tujuan ini mengandung makna tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan, terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan Sekretariat DPRD bersinergi dengan pelaksanaan tujuan ke-4 dengan sasaran ke-1 yaitu Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan bagi DPRD maka secara tidak langsung juga dapat meningkatkan penyelenggaraan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, karena DPRD adalah salah satu unsur pemerintahan Daerah selain Kepala Daerah. Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tersebut, dilaksanakan melalui dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan fungsi pelayanannya masih terdapat faktor penghambat, antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman staf tentang tugas pokok dan fungsi.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.
3. Intervensi anggota DPRD yang berlebihan.

Dan terdapat faktor pendorong yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD berjalan baik, yaitu :

1. Dukungan anggaran yang relatif besar.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
3. Adanya produk peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi Sekretariat DPRD.
4. Sinergitas hubungan yang cukup harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD.

Tabel 3.2
Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan
Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH			RENSTRA SEKRETARIAT DPRD		
Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4	5	6
Tujuan ke-4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan”		Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD
		Nilai SAKIP			

Telaah Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

Secara hirarkis, tidak terdapat keterkaitan antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi dengan Sekretariat DPRD Kabupaten, sehingga tidak terdapat keterkaitan antara faktor-faktor penghambat dan pendorong dari masing-masing lembaga tersebut terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Namun, sebagai Perangkat Daerah dan juga Lembaga yang sama-sama memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada anggota DPR/DPRD, maka indikator kinerja utama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dengan Sekretariat Jenderal DPR RI dan juga Sekretariat DPRD Provinsi memiliki kesamaan.

Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat terdapat satu Indikator Kinerja Utama yaitu Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan Target Kinerja Point/Angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan pada Sekretariat Jenderal DPR RI terdapat beberapa indikator kinerja utama yang salah satunya adalah **Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Sekretariat Jenderal DPR RI** dengan target kinerja berupa POINT/ANGKA.

Walau terdapat perbedaan satuan indikator kinerja utama, namun pada intinya sama-sama menunjukkan indeks penilaian terhadap kinerja Sekretariat DPR RI dan juga Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yang menunjukkan tingkat kepuasan anggota DPR/DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPR/DPRD.

Pada Renstra Sekretariat DPRD Provinsi indikator kinerja utama pun terkait dengan tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara langsung tidak terdapat keterkaitan antara faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan pelayanan Sekretariat DPRD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi, kejadian, fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada.

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan dengan nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk dicarikan pemecahannya.

Isu-isu strategis yang diuraikan dalam renstra ini merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD di masa yang akan datang.

Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

- b. Ketersediaan ruang publik sebagai bagian dari upaya menyediakan ruang aspirasi masyarakat;
- c. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD dan DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD;
- d. Tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi terkait dengan kinerja anggota DPRD dan aparatur Sekretariat DPRD;
- e. Belum optimalnya kualitas pengkajian kebijakan dan pengembangan bahan penyusunan produk hukum Raperda, Peraturan dan Keputusan;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dalam rangka mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, terutama **Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan** dengan sasaran yang ditetapkan yaitu **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan** maka ditetapkan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat yaitu **Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas.**

4.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat adalah **Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.**

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			
				1	2	3	4
1	Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas		Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	TINGGI	TINGGI	TINGGI	TINGGI
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	95,00	95,50	96,00	96,50

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan kompherensip tentang bagaimana Sekretariat DPRD mencapai tujuan dan sasaran renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yag selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebjakan.

Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai visi misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD telah ditetapkan strategis dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TUJUAN KE 4 RPD	TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, INOVATIF DAN TRANSPARAN		
SASARAN KE -1 RPD	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pengawasan kegiatan kesekretariatan dan keuangan	1. Penyusunan SOP kegiatan yang baik dan benar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. 2. Peningkatan kualitas, kompetensi dan pemahaman pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Aparatur Sekretariat DPRD melalui pendidikan dan pelatihan, pembinaan mental, bimbingan teknis, kursus dan seminar.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

			3. Peningkatan pengawasan internal kegiatan kesekretariatan dan keuangan. 4. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kantor dengan optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui kegiatan pemeliharaan aset.
		2. Meningkatkan dukungan layanan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;	1. Peningkatan koordinasi antar Bagian dalam rangka penyusunan rencana kerja DPRD dan pelaksanaan kegiatan DPRD. 2. Peningkatan kuantitas dan kompetensi tenaga Legal Drafter melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar. 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi anggota DPRD dalam hal penyusunan produk hukum daerah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dan seminar.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

			4. Peningkatan kualitas penyusunan dan pembahasan produk hukum daerah dengan pelaksanaan penyusunan dan pembahasan yang efektif dan efisien. 4. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan fungsi anggaran melalui pelaksanaan rapat pembahasan kebijakan anggaran yang efektif dan efisien. 5. Peningkatan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan pengawasan DPRD melalui pengagendaan kegiatan kunjungan kerja dan rapat yang lebih jelas dan sistematis.
		3. Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan aspirasi masyarakat;	1. Peningkatan sosialisasi dan aksestabilitas website DPRD sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat. 2. Peningkatan kualitas dukungan dan fasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat melalui pendampingan kegiatan reses dan kunjungan kerja dalam daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

			3. Peningkatan kualitas penghimpunan dan penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD.
		4 Meningkatkan penyampaian informasi kinerja DPRD kepada masyarakat;	1. Peningkatan kualitas dan jangkauan website DPRD sebagai sarana penyampaian informasi kinerja DPRD. 2. Peningkatan kualitas penyusunan bahan publikasi kinerja DPRD. 3. Peningkatan penyampaian informasi kinerja kegiatan DPRD melalui optimalisasi kegiatan publikasi melalui media cetak, elektronik dan media online.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra perangkat daerah perlu disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif.

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- f. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Mebel

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

- a. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
- b. Fasilitasi Fraksi DPRD
- c. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- c. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- d. Penyusunan Tata Tertib DPRD

2. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- a. Pembahasan KUA dan PPAS
- b. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c. Pembahasan APBD
- d. Pembahasan APBD Perubahan
- e. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

4. Peningkatan Kapasitas DPRD

- a. Orientasi DPRD
- b. Pendalaman Tugas DPRD
- c. Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- d. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- e. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
- f. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- a. Kunjungan Kerja dalam Daerah
- b. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- c. Pelaksanaan Reses

6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

- a. Penyusunan Kode Etik DPRD

7. Pembahasan Kerja Sama Daerah

- a. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

8. Fasilitasi Tugas DPRD

- a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- b. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- d. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Penetapan indikator kinerja program bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian kinerja program yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD tercapai.

Indikator kinerja program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat, adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	80,00	80,50	80,75	81,00

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Terlaksananya Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tabel 6.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output), Kegiatan (Output) dan Subkegiatan (Output)	Data Capaian Renstra Periode Sebelumnya (Realisasi 2018 s.d 2021)	Data Capaian Awal Perencanaan Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024		Tahun 2024		Tahun 2024			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwujudkan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang berkualitas				Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	BAIK	BAIK	TINGGI	51,806,111,870	TINGGI	60,481,763,500	TINGGI	59,938,600,000	TINGGI	64,165,200,850	TINGGI	236,391,676,220		
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD			Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	95,00	95,00	95,00	51,806,111,870	95,50	60,481,763,500	96,00	59,938,600,000	96,50	64,165,200,850	96,50	236,391,676,220		
		4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	81,25	81,25	80,00	25,445,481,370	80,50	30,743,250,000	80,75	28,480,500,000	81,00	29,826,092,600	81,00	114,495,323,970		
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	20,000,000	11 Dokumen	23,500,000	11 Dokumen	27,000,000	12 Dokumen	34,000,000	45 Dokumen	104,500,000		
				Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	20 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	67,110,000	5 Dokumen	72,000,000	5 Dokumen	80,500,000	5 Dokumen	88,500,000	20 Dokumen	308,110,000		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	104,210,370	13 Dokumen	120,000,000	13 Dokumen	140,000,000	13 Dokumen	155,000,000	52 Dokumen	519,210,370		
		4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45 Dokumen	8 Dokumen	11 Dokumen	20,000,000	11 Dokumen	23,500,000	11 Dokumen	27,000,000	12 Dokumen	34,000,000	45 Dokumen	104,500,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	17,500,000	4 Dokumen	63,500,000	Set DPRD	Liwa, LB

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13,605,000	1 Dokumen	14,250,000	1 Dokumen	16,000,000	1 Dokumen	17,500,000	4 Dokumen	61,355,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13,125,000	1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	16,500,000	1 Dokumen	18,500,000	4 Dokumen	62,625,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	13,010,000	1 Dokumen	14,250,000	1 Dokumen	15,500,000	1 Dokumen	17,000,000	4 Dokumen	59,760,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,870,000	1 Laporan	14,000,000	1 Laporan	16,000,000	1 Laporan	18,000,000	4 Laporan	60,870,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	52 Laporan	12 Laporan	13 Laporan	104,210,370	13 Laporan	120,000,000	13 Laporan	140,000,000	13 Laporan	155,000,000	52 Laporan	519,210,370	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	33 Orang	40 Orang	2,950,000,000	40 Orang	3,000,000,000	40 Orang	3,125,000,000	40 Orang	3,165,000,000	40 Orang	12,240,000,000		
				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	17,500,000	4 Dokumen	55,000,000		
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,800,000	1 Laporan	12,500,000	1 Laporan	14,500,000	1 Laporan	16,500,000	4 Laporan	54,300,000		
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	16,000,000	4 Dokumen	52,500,000		
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	2 Laporan	13,000,000	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	16,000,000	8 Laporan	55,000,000		

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

				Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	16,000,000	4 Dokumen	54,000,000		
		4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	33 Orang	40 Orang	2,950,000,000	40 Orang	3,000,000,000	40 Orang	3,125,000,000	40 Orang	3,165,000,000	40 Orang	12,240,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	17,500,000	4 Dokumen	55,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,800,000	1 Laporan	12,500,000	1 Laporan	14,500,000	1 Laporan	16,500,000	4 Laporan	54,300,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	16,000,000	4 Dokumen	52,500,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	11,000,000	2 Laporan	13,000,000	2 Laporan	15,000,000	2 Laporan	16,000,000	8 Laporan	55,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,500,000	1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	16,000,000	4 Dokumen	54,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	11,500,000	6 Dokumen	13,500,000	6 Dokumen	14,500,000	6 Dokumen	15,500,000	24 Dokumen	55,000,000		
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	30 Orang	35 Orang	335,350,000	37 Orang	375,000,000	40 Orang	400,000,000	40 Orang	425,000,000	40 Orang	1,535,350,000		
		4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Dokumen	11,500,000	6 Dokumen	13,500,000	6 Dokumen	14,500,000	6 Dokumen	15,500,000	24 Dokumen	55,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	33 Orang	30 Orang	35 Orang	335,350,000	37 Orang	375,000,000	40 Orang	400,000,000	40 Orang	425,000,000	40 Orang	1,535,350,000	Set DPRD	Liwa, LB

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	14 Paket	426,785,000	14 Paket	50,000,000	14 Paket	55,000,000	15 Paket	60,000,000	57 Paket	591,785,000		
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Paket	0 Paket	6 Paket	350,000,000	10 Paket	500,000,000	10 Paket	550,000,000	10 Paket	650,000,000	36 Paket	2,050,000,000		
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	46 paket	5 Paket	-	-	10 Paket	650,000,000	7 Paket	250,000,000	8 Paket	35,000,000	25 Paket	935,000,000		
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	2 Paket	30,160,000	2 Paket	35,000,000	2 Paket	40,000,000	2 Paket	44,000,000	8 Paket	149,160,000		
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120 Paket	33 Paket	29 Paket	306,100,000	33 Paket	345,000,000	36 Paket	400,000,000	40 Paket	450,000,000	138 Paket	1,501,100,000		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	100 Dokumen	90 Dokumen	1,374,600,000	95 Dokumen	1,650,000,000	100 Dokumen	1,750,000,000	125 Dokumen	1,829,592,600	125 Dokumen	6,604,192,600		
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	225,000,000	1 Laporan	275,000,000	1 Laporan	300,000,000	4 Laporan	1,000,000,000		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	20 Laporan	15 Laporan	988,710,000	23 Laporan	1,068,000,000	25 Laporan	1,175,000,000	27 Laporan	1,290,000,000	95 Laporan	4,521,710,000		
		4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	48 Paket	12 Paket	14 Paket	426,785,000	14 Paket	50,000,000	14 Paket	55,000,000	15 Paket	60,000,000	57 Paket	591,785,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	63 Paket	0 Paket	6 Paket	354,912,500	10 Paket	500,000,000	10 Paket	550,000,000	10 Paket	650,000,000	36 Paket	2,050,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	46 paket	5 Paket	-	-	10 Paket	650,000,000	7 Paket	250,000,000	8 Paket	35,000,000	25 Paket	935,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	2 Paket	30,160,000	2 Paket	35,000,000	2 Paket	40,000,000	2 Paket	44,000,000	8 Paket	149,160,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	120 Paket	33 Paket	29 Paket	306,100,000	33 Paket	345,000,000	36 Paket	400,000,000	40 Paket	450,000,000	138 Paket	1,501,100,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 Dokumen	100 Dokumen	90 Dokumen	1,374,600,000	95 Dokumen	1,650,000,000	100 Dokumen	1,750,000,000	125 Dokumen	1,829,592,600	125 Dokumen	6,604,192,600	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	225,000,000	1 Laporan	275,000,000	1 Laporan	300,000,000	4 Laporan	1,000,000,000	Set DPRD	Liwa, LB

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan	20 Laporan	15 Laporan	988,710,000	23 Laporan	1,068,000,000	25 Laporan	1,175,000,000	27 Laporan	1,290,000,000	95 Laporan	4,521,710,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	7 Unit	0 Unit	0 Unit	-	28 Unit	2,550,000,000	10 Unit	350,000,000	10 Unit	375,000,000	48 Unit	3,275,000,000		
		4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	0 Unit	-	3 Unit	2,000,000,000	0 Unit	-	0 Unit	-	3 Unit	2,000,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	0 Unit	-	25 Unit	550,000,000	10 Unit	350,000,000	10 Unit	375,000,000	45 Unit	1,275,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11,000,000	1 Laporan	12,500,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	17,500,000	4 Laporan	56,000,000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	170,000,000	1 Laporan	185,000,000	1 Laporan	210,000,000	1 Laporan	240,000,000	4 Laporan	805,000,000		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	375,000,000	1 Laporan	400,000,000	4 Laporan	1,425,000,000		
		4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	11,000,000	1 Laporan	12,500,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	17,500,000	4 Laporan	56,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	170,000,000	1 Laporan	185,000,000	1 Laporan	210,000,000	1 Laporan	240,000,000	4 Laporan	805,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	350,000,000	1 Laporan	375,000,000	1 Laporan	400,000,000	4 Laporan	1,425,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	149 Unit	85 Unit	136 Unit	1,285,000,000	139 Unit	1,600,000,000	151 Unit	1,735,000,000	159 Unit	1,975,000,000	161 Unit	6,595,000,000		
		4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit	3 Unit	275,000,000	3 Unit	300,000,000	3 Unit	335,000,000	3 Unit	375,000,000	3 Unit	1,285,000,000	Set DPRD	Liwa, LB

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	26 Unit	350,000,000	26 Unit	385,000,000	26 Unit	415,000,000	26 Unit	445,000,000	26 Unit	1,595,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	75 Unit	39 Unit	69 Unit	25,000,000	70 Unit	30,000,000	75 Unit	35,000,000	80 Unit	40,000,000	80 Unit	130,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	14 Unit	33 Unit	110,000,000	35 Unit	135,000,000	40 Unit	150,000,000	45 Unit	165,000,000	45 Unit	560,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	5 Unit	5 Unit	525,000,000	6 Unit	750,000,000	7 Unit	800,000,000	5 Unit	950,000,000	7 Unit	3,025,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	35 Orang	35 Orang	14,650,000,000	35 Orang	15,000,000,000	35 Orang	15,500,000,000	35 Orang	16,000,000,000	35 Orang	61,150,000,000		
				Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4 Paket	475,000,000	6 Paket	1,166,250,000	4 Paket	475,000,000	4 Paket	650,000,000	19 Paket	2,766,250,000		
				Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	35 Orang	310,156,000	35 Orang	325,000,000	35 Orang	350,000,000	35 Orang	375,000,000	35 Orang	1,360,156,000		
		4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang	35 Orang	35 Orang	14,650,000,000	35 Orang	15,000,000,000	35 Orang	15,500,000,000	35 Orang	16,000,000,000	35 Orang	61,150,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	4 Paket	475,000,000	6 Paket	1,166,250,000	4 Paket	475,000,000	4 Paket	650,000,000	19 Paket	2,766,250,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	35 Orang	35 Orang	310,156,000	35 Orang	325,000,000	35 Orang	350,000,000	35 Orang	375,000,000	35 Orang	1,360,156,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	375,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	95,000,000	5 Dokumen	630,000,000		
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	1 Laporan	180,000,000	1 Laporan	200,000,000	4 Laporan	695,000,000		
				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	3 Paket	3 Paket	802,000,000	3 Paket	825,000,000	3 Paket	850,000,000	3 Paket	875,000,000	12 Paket	3,352,000,000		
		4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	2 Dokumen	375,000,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	95,000,000	5 Dokumen	630,000,000	Set DPRD	Liwa, LB

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	165,000,000	1 Laporan	180,000,000	1 Laporan	200,000,000	4 Laporan	695,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Paket Kebutuhan Rumah Tangga yang Disediakan DPRD	12 Paket	3 Paket	3 Paket	802,000,000	3 Paket	825,000,000	3 Paket	850,000,000	3 Paket	875,000,000	12 Paket	3,352,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	108%	108%	100.00%	23,630,630,500	100%	26,670,562,500	100%	28,148,400,000	100%	30,771,316,250	100%	109,220,909,250		
				Persentase Publikasi Kinerja DPRD Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	2,730,000,000	100%	3,067,951,000	100%	3,309,700,000	100%	3,567,792,000	100%	12,675,443,000		
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	17,500,000	1 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	65,500,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	33 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	110,000,000	7 Dokumen	135,000,000	7 Dokumen	165,000,000	7 Dokumen	185,000,000	28 Dokumen	595,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	730,000,000	2 Dokumen	815,000,000	2 Dokumen	885,000,000	2 Dokumen	975,000,000	8 Dokumen	3,405,000,000		
				Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000		
		4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	-	-	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	17,500,000	1 Dokumen	20,000,000	4 Dokumen	65,500,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	33 Dokumen	8 Dokumen	7 Dokumen	110,000,000	7 Dokumen	135,000,000	7 Dokumen	165,000,000	7 Dokumen	185,000,000	28 Dokumen	595,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	730,000,000	2 Dokumen	815,000,000	2 Dokumen	885,000,000	2 Dokumen	975,000,000	8 Dokumen	3,405,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000	-	-	-	-	1 Dokumen	200,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	36,500,000	1 Dokumen	38,000,000	4 Dokumen	137,500,000		

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	36,500,000	1 Dokumen	38,000,000	4 Dokumen	137,500,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	67,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	4 Dokumen	282,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	62,500,000	1 Dokumen	67,760,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	4 Dokumen	285,260,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	67,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	4 Dokumen	282,000,000		
		4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	36,500,000	1 Dokumen	38,000,000	4 Dokumen	137,500,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	36,500,000	1 Dokumen	38,000,000	4 Dokumen	137,500,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	67,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	4 Dokumen	282,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	62,500,000	1 Dokumen	67,760,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	4 Dokumen	285,260,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggung jawaban APBD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	67,000,000	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	4 Dokumen	282,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	9 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	170,000,000	5 Laporan	190,000,000	5 Laporan	225,000,000	6 Laporan	250,000,000	20 Laporan	835,000,000		
				Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	9 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	170,000,000	5 Laporan	190,000,000	5 Laporan	225,000,000	6 Laporan	250,000,000	20 Laporan	835,000,000		
				Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	170,000,000	5 Laporan	190,000,000	5 Laporan	225,000,000	6 Laporan	250,000,000	20 Laporan	835,000,000		
		4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	9 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	170,000,000	5 Laporan	190,000,000	5 Laporan	225,000,000	6 Laporan	250,000,000	20 Laporan	835,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	9 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	170,000,000	5 Laporan	190,000,000	5 Laporan	225,000,000	6 Laporan	250,000,000	20 Laporan	835,000,000	Set DPRD	Liwa, LB

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026

Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	9 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	170,000,000	5 Laporan	190,000,000	5 Laporan	225,000,000	6 Laporan	250,000,000	20 Laporan	835,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	450,000,000					1 Dokumen	450,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3,350,000,000	6 Dokumen	3,500,000,000	6 Dokumen	3,850,000,000	6 Dokumen	4,000,000,000	24 Dokumen	14,500,000,000		
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,350,000,000	1 Dokumen	2,650,000,000	1 Dokumen	2,850,000,000	1 Dokumen	3,062,000,000	4 Dokumen	10,912,000,000		
				Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	8 Orang	355,000,000	8 Orang	400,000,000	8 Orang	450,000,000	8 Orang	520,000,000	32 Orang	1,725,000,000		
				Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24 Orang	6 Orang	6 Orang	290,000,000	6 Orang	310,000,000	6 Orang	335,000,000	6 Orang	350,000,000	24 Orang	1,285,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	3,197,250,000	5 Dokumen	3,251,975,000	5 Dokumen	3,407,172,500	5 Dokumen	3,662,889,750	20 Dokumen	13,519,287,250		
		4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	450,000,000					1 Dokumen	450,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3,350,000,000	6 Dokumen	3,500,000,000	6 Dokumen	3,850,000,000	6 Dokumen	4,000,000,000	24 Dokumen	14,500,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2,350,000,000	1 Dokumen	2,650,000,000	1 Dokumen	2,850,000,000	1 Dokumen	3,062,000,000	4 Dokumen	10,912,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	-	-	8 Orang	355,000,000	8 Orang	400,000,000	8 Orang	450,000,000	8 Orang	520,000,000	32 Orang	1,725,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	24 Orang	6 Orang	6 Orang	290,000,000	6 Orang	310,000,000	6 Orang	335,000,000	6 Orang	350,000,000	24 Orang	1,285,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	5 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	3,197,250,000	5 Dokumen	3,251,975,000	5 Dokumen	3,407,172,500	5 Dokumen	3,662,889,750	20 Dokumen	13,519,287,250	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	300,000,000	4 Laporan	364,200,000	5 Laporan	455,250,000	6 Laporan	546,300,000	18 Laporan	1,665,750,000		
				Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	65,000,000	4 Dokumen	225,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2,652,000,000	3 Dokumen	2,950,000,000	3 Dokumen	3,100,000,000	3 Dokumen	3,350,000,000	12 Dokumen	12,052,000,000		

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	8 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	300,000,000	4 Laporan	364,200,000	5 Laporan	455,250,000	6 Laporan	546,300,000	18 Laporan	1,665,750,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	65,000,000	4 Dokumen	225,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	11 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2,652,000,000	3 Dokumen	2,950,000,000	3 Dokumen	3,100,000,000	3 Dokumen	3,350,000,000	12 Dokumen	12,052,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-	-	-	2 Dokumen	190,098,000	-	-	-	-	2 Dokumen	190,098,000		
		4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	-	-	-	2 Dokumen	190,098,000	-	-	-	-	2 Dokumen	190,098,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	-	4 Dokumen	380,000,000	4 Dokumen	417,951,000	4 Dokumen	459,700,000	4 Dokumen	505,792,000	16 Dokumen	1,763,443,000		
		4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	-	-	4 Dokumen	380,000,000	4 Dokumen	417,951,000	4 Dokumen	459,700,000	4 Dokumen	505,792,000	16 Dokumen	1,763,443,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	83 Dokumen	25 Dokumen	14 Dokumen	6,415,000,000	15 Dokumen	7,100,000,000	16 Dokumen	8,000,000,000	17 Dokumen	8,900,000,000	62 Dokumen	30,415,000,000		
				Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	41,000,000	3 Laporan	43,500,000	3 Laporan	45,000,000	3 Laporan	47,500,000	12 Laporan	177,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	190,000,000	4 Dokumen	210,000,000	4 Dokumen	245,000,000	4 Dokumen	270,000,000	16 Dokumen	915,000,000		
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	5,189,880,500	12 Dokumen	5,843,029,500	13 Dokumen	6,160,477,500	14 Dokumen	6,813,626,500	49 Dokumen	24,007,014,000		
		4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	83 Dokumen	25 Dokumen	14 Dokumen	6,415,000,000	15 Dokumen	7,100,000,000	16 Dokumen	8,000,000,000	17 Dokumen	8,900,000,000	62 Dokumen	30,415,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	41,000,000	3 Laporan	43,500,000	3 Laporan	45,000,000	3 Laporan	47,500,000	12 Laporan	177,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	16 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	190,000,000	4 Dokumen	210,000,000	4 Dokumen	245,000,000	4 Dokumen	270,000,000	16 Dokumen	915,000,000	Set DPRD	Liwa, LB
		4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	0 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	5,189,880,500	12 Dokumen	5,843,029,500	13 Dokumen	6,160,477,500	14 Dokumen	6,813,626,500	49 Dokumen	24,007,014,000	Set DPRD	Liwa, LB

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Tabel 6.2

DETAIL SUB KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN 2023-2026

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Detail Khusus Subkegiatan (Tahun)			
		2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : 11 dokumen Uraian belanja : Penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 11 dokumen Uraian belanja : Penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 11 dokumen Uraian belanja : Penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 12 dokumen Uraian belanja : Penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		dan makan minum rapat	dan makan minum rapat	dan makan minum rapat	dan makan minum rapat
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 1 dokumen. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat
4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : 1 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : 13 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat,	Keluaran : 13 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat,	Keluaran : 13 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat,	Keluaran : 13 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer, makan minum rapat,

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		jasa konsultasi pendampingan survey dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.	jasa konsultasi pendampingan survey dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.	jasa konsultasi pendampingan survey dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.	jasa konsultasi pendampingan survey dan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi.
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji PNS selama 1 tahun sebanyak 40 orang	Penyediaan Gaji PNS selama 1 tahun sebanyak 40 orang	Penyediaan Gaji PNS selama 1 tahun sebanyak 40 orang	Penyediaan Gaji PNS selama 1 tahun sebanyak 40 orang
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.
4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : 1 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.
4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.
4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan	Keluaran : 2 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan	Keluaran : 2 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan	Keluaran : 2 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan	Keluaran : 2 Laporan. Uraian belanja : penyediaan ATK, kertas/cover, bahan

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

	an/Semesteran SKPD	cetak dan bahan komputer.	cetak dan bahan komputer.	cetak dan bahan komputer.	cetak dan bahan komputer.
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.	Keluaran : 1 Dokumen. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak dan bahan komputer.
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Keluaran : 6 Dokumen. Dengan melaksanakan rapat sebanyak 6 kali. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 6 Dokumen. Dengan melaksanakan rapat sebanyak 6 kali. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 6 Dokumen. Dengan melaksanakan rapat sebanyak 6 kali. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat	Keluaran : 6 Dokumen. Dengan melaksanakan rapat sebanyak 6 kali. Uraian belanja : peny. ATK, kertas/cover, bahan cetak, bahan komputer dan makan minum rapat
4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pelaksanaan Bimtek PNS selama 1 tahun dengan jumlah 35 Orang.	Pelaksanaan Bimtek PNS selama 1 tahun dengan jumlah 40 Orang.	Pelaksanaan Bimtek PNS selama 1 tahun dengan jumlah 40 Orang.	Pelaksanaan Bimtek PNS selama 1 tahun dengan jumlah 45 Orang.
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebanyak 14 Paket dalam 1 tahun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebanyak 14 Paket dalam 1 tahun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebanyak 14 Paket dalam 1 tahun	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik sebanyak 15 Paket dalam 1 tahun
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Pengadaan Peralatan Kantor sebanyak 6 Paket	Pengadaan Peralatan Kantor sebanyak 10	Pengadaan Peralatan Kantor sebanyak 10	Pengadaan Peralatan Kantor sebanyak 10

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

	Perlengkapan Kantor	dalam 1 tahun	Paket dalam 1 tahun	Paket dalam 1 tahun	Paket dalam 1 tahun
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 10 Paket	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 7 Paket	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga sebanyak 8 Paket
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 2 Paket selama 1 tahun	Penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 2 Paket selama 1 tahun	Penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 2 Paket selama 1 tahun	Penyediaan bahan logistik kantor sebanyak 2 Paket selama 1 tahun
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan bahan cetakan sebanyak 29 Paket selama 1 tahun	Penyediaan bahan cetakan sebanyak 33 Paket selama 1 tahun	Penyediaan bahan cetakan sebanyak 36 Paket selama 1 tahun	Penyediaan bahan cetakan sebanyak 40 Paket selama 1 tahun
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan sebanyak 90 SKHU Nasional, SKHU, SKM dan majalah selama 1 tahun	Penyediaan Bahan Bacaan sebanyak 95 SKHU Nasional, SKHU, SKM dan majalah selama 1 tahun	Penyediaan Bahan Bacaan sebanyak 100 SKHU Nasional, SKHU, SKM dan majalah selama 1 tahun	Penyediaan Bahan Bacaan sebanyak 125 SKHU Nasional, SKHU, SKM dan majalah selama 1 tahun
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan Ekstra Puding Tamu sebanyak 13 jenis makanan dan minuman setahun	Penyediaan Ekstra Puding Tamu sebanyak 13 jenis makanan dan minuman setahun	Penyediaan Ekstra Puding Tamu sebanyak 13 jenis makanan dan minuman setahun	Penyediaan Ekstra Puding Tamu sebanyak 13 jenis makanan dan minuman setahun
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah sebanyak 15 Kali	Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah sebanyak 23 Kali	Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah sebanyak 25 Kali	Perjalanan Dinas Dalam daerah dan Luar Daerah sebanyak 27 Kali
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Pengadaan Kendaraan roda 4 untuk Pimpinan sebanyak 3 Unit	-	-
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	-	Pengadaan Meubelair Kantor sebanyak 25 Unit	Pengadaan Meubelair Kantor sebanyak 10 Unit	Pengadaan Meubelair Kantor sebanyak 10 Unit
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Materai dan Jasa Pengiriman dalam 1 tahun	Penyediaan Materai dan Jasa Pengiriman dalam 1 tahun	Penyediaan Materai dan Jasa Pengiriman dalam 1 tahun	Penyediaan Materai dan Jasa Pengiriman dalam 1 tahun
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan anggaran untuk pembayaran 13 rekening telpon, 3 rekening air dan 6 rekening listrik dalam 1 tahun	Penyediaan anggaran untuk pembayaran 13 rekening telpon, 3 rekening air dan 6 rekening listrik dalam 1 tahun	Penyediaan anggaran untuk pembayaran 13 rekening telpon, 3 rekening air dan 6 rekening listrik dalam 1 tahun	Penyediaan anggaran untuk pembayaran 13 rekening telpon, 3 rekening air dan 6 rekening listrik dalam 1 tahun
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, honor tenaga kontrak sebanyak 12 orang, pihak ketiga untuk pengelola kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan selama 12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, honor tenaga kontrak sebanyak 12 orang, pihak ketiga untuk pengelola kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, honor tenaga kontrak sebanyak 12 orang, pihak ketiga untuk pengelola kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor untuk Pembayaran Honor Pengelola Keuangan, honor tenaga kontrak sebanyak 12 orang, pihak ketiga untuk pengelola kebersihan kantor dan pembelian peralatan kebersihan

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		bulan.	selama 12 bulan.	selama 12 bulan.	selama 12 bulan.
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Kendaraan Pimpinan sebanyak 3 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Kendaraan Pimpinan sebanyak 3 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Kendaraan Pimpinan sebanyak 3 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Kendaraan Pimpinan sebanyak 3 Unit dalam 1 tahun
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Operasional untuk 26 Unit kendaraan (8 Unit Roda 4 dan 18 Unit Roda Dua) dalam 1 tahun	Pemeliharaan Kendaraan Operasional untuk 26 Unit kendaraan (8 Unit Roda 4 dan 18 Unit Roda Dua) dalam 1 tahun	Pemeliharaan Kendaraan Operasional untuk 26 Unit kendaraan (8 Unit Roda 4 dan 18 Unit Roda Dua) dalam 1 tahun	Pemeliharaan Kendaraan Operasional untuk 26 Unit kendaraan (8 Unit Roda 4 dan 18 Unit Roda Dua) dalam 1 tahun
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Meubel sebanyak 69 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Meubel sebanyak 70 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Meubel sebanyak 75 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Meubel sebanyak 80 Unit dalam 1 tahun
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebanyak 33 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebanyak 35 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebanyak 40 Unit dalam 1 tahun	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebanyak 45 Unit dalam 1 tahun
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Reh	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Gedung	Pemeliharaan Gedung

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

	abilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 5 unit dalam 1 tahun	Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 6 unit dalam 1 tahun	Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 7 unit dalam 1 tahun	Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 5 unit dalam 1 tahun
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Penyediaan Gaji Anggota DPRD sebanyak 35 Orang selama 1 tahun	Penyediaan Gaji Anggota DPRD sebanyak 35 Orang selama 1 tahun	Penyediaan Gaji Anggota DPRD sebanyak 35 Orang selama 1 tahun	Penyediaan Gaji Anggota DPRD sebanyak 35 Orang selama 1 tahun
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Penyediaan Pakaian Anggota DPRD dengan rincian : PDH 70 Stell, PSR 35 Stell, PSH 35 Stell, Pakaian Adat 35 Stell.	Penyediaan Pakaian Anggota DPRD dengan rincian : PDH 70 Stell, PSR 35 Stell, PSH 35 Stell, Pakaian Adat 35 Stell, PSL 35 Steel dan PIN DPRD	Penyediaan Pakaian Anggota DPRD dengan rincian : PDH 70 Stell, PSR 35 Stell, PSH 35 Stell, Pakaian Adat 35 Stell.	Penyediaan Pakaian Anggota DPRD dengan rincian : PDH 70 Stell, PSR 35 Stell, PSH 35 Stell, Pakaian Adat 35 Stell.
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Chek Up untuk 35 Anggota DPRD	Pelaksanaan Medical Chek Up untuk 35 Anggota DPRD	Pelaksanaan Medical Chek Up untuk 35 Anggota DPRD	Pelaksanaan Medical Chek Up untuk 35 Anggota DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD				
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD/ Pimpinan DPRD sebanyak 1 Kali dalam 1 tahun	Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD/ Pimpinan DPRD sebanyak 2 Kali dalam 1 tahun	Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD/ Pimpinan DPRD sebanyak 1 Kali dalam 1 tahun	Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD/ Pimpinan DPRD sebanyak 1 Kali dalam 1 tahun

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Pelaksanaan Rapat-rapat Fraksi sebanyak 216 Kali dalam 1 tahun.	Pelaksanaan Rapat-rapat Fraksi sebanyak 216 Kali dalam 1 tahun.	Pelaksanaan Rapat-rapat Fraksi sebanyak 216 Kali dalam 1 tahun.	Pelaksanaan Rapat-rapat Fraksi sebanyak 216 Kali dalam 1 tahun.
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebanyak 3 Paket selama 1 tahun	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebanyak 3 Paket selama 1 tahun	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebanyak 3 Paket selama 1 tahun	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebanyak 3 Paket selama 1 tahun
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Keluaran : 1 Dokumen. Berupa Persetujuan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Keluaran : 1 Dokumen. Berupa Persetujuan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Keluaran : 1 Dokumen. Berupa Persetujuan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah.	Keluaran : 1 Dokumen. Berupa Persetujuan Bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah.
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Rapat Pembahasan Ranperda selama satu tahun dengan target 75 Kali rapat untuk 7 Ranperda	Rapat Pembahasan Ranperda selama satu tahun dengan target 75 Kali rapat untuk 7 Ranperda	Rapat Pembahasan Ranperda selama satu tahun dengan target 75 Kali rapat untuk 7 Ranperda	Rapat Pembahasan Ranperda selama satu tahun dengan target 75 Kali rapat untuk 7 Ranperda
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD sebanyak 2 Buah dalam 1 tahun	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD sebanyak 2 Buah dalam 1 tahun	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD sebanyak 2 Buah dalam 1 tahun	Penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD sebanyak 2 Buah dalam 1 tahun

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

	Naskah Akademik				
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	-	Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Cetak Buku Tata Tertib sebanyak 150 Buah	-	-
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Rapat Pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 5 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 5 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 5 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 5 Kali dalam 1 tahun
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 5 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 5 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 5 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebanyak 5 Kali dalam 1 tahun
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Rapat Pembahasan APBD sebanyak 10 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan APBD sebanyak 10 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan APBD sebanyak 10 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan APBD sebanyak 10 Kali dalam 1 tahun
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Rapat Pembahasan APBD Perubahan sebanyak 10 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan APBD Perubahan sebanyak 10 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan APBD Perubahan sebanyak 10 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan APBD Perubahan sebanyak 10 Kali dalam 1 tahun
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 8 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 8 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 8 Kali dalam 1 tahun	Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD sebanyak 8 Kali dalam 1 tahun
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				
4.02.02.2.03.01	Pengawasan	Kunjungan Kerja dalam	Kunjungan Kerja dalam	Kunjungan Kerja dalam	Kunjungan Kerja dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

	Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Daerah Komisi I sebanyak 4 Kali dan Rapat sebanyak 8 Kali	Daerah Komisi I sebanyak 5 Kali dan Rapat sebanyak 10 Kali	Daerah Komisi I sebanyak 5 Kali dan Rapat sebanyak 12 Kali	Daerah Komisi I sebanyak 6 Kali dan Rapat sebanyak 14 Kali
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi II sebanyak 4 Kali dan Rapat sebanyak 8 Kali	Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi II sebanyak 5 Kali dan Rapat sebanyak 10 Kali	Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi II sebanyak 5 Kali dan Rapat sebanyak 12 Kali	Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi II sebanyak 6 Kali dan Rapat sebanyak 14 Kali
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi III sebanyak 4 Kali dan Rapat sebanyak 8 Kali	Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi III sebanyak 5 Kali dan Rapat sebanyak 10 Kali	Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi III sebanyak 5 Kali dan Rapat sebanyak 12 Kali	Kunjungan Kerja dalam Daerah Komisi III sebanyak 6 Kali dan Rapat sebanyak 14 Kali
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD				
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	-	Pelaksanaan Orientasi Bagi Anggota DPRD Periode 2024-2029 (yang baru dilantik) sebanyak 1 kali	-	-
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas Anggota DPRD (Bimtek DPRD) sebanyak 6 kali (3 Bimtek di Luar Provinsi dan 3 Bimtek Dalam Provinsi)	Pendalaman Tugas Anggota DPRD (Bimtek DPRD) sebanyak 6 kali (3 Bimtek di Luar Provinsi dan 3 Bimtek Dalam Provinsi)	Pendalaman Tugas Anggota DPRD (Bimtek DPRD) sebanyak 6 kali (3 Bimtek di Luar Provinsi dan 3 Bimtek Dalam Provinsi)	Pendalaman Tugas Anggota DPRD (Bimtek DPRD) sebanyak 6 kali (3 Bimtek di Luar Provinsi dan 3 Bimtek Dalam Provinsi)
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Publikasi dan Dokumentasi Dewan terdiri dari 1 Pembuatan Billboard, Iklan Media	Publikasi dan Dokumentasi Dewan terdiri dari 1 Pembuatan Billboard,	Publikasi dan Dokumentasi Dewan terdiri dari 1 Pembuatan Billboard,	Publikasi dan Dokumentasi Dewan terdiri dari 1 Pembuatan Billboard,

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		massa 116 kali, Jasa Penyiaran 15 Kali, Jasa Publikasi 105 kali dan Penerbitan Halaman Khusus 119 kali.	Iklan Media massa 130 kali, Jasa Penyiaran 20 Kali, Jasa Publikasi 120 kali dan Penerbitan Halaman Khusus 125 kali.	Iklan Media massa 140 kali, Jasa Penyiaran 25 Kali, Jasa Publikasi 130 kali dan Penerbitan Halaman Khusus 135 kali.	Iklan Media massa 145 kali, Jasa Penyiaran 30 Kali, Jasa Publikasi 135 kali dan Penerbitan Halaman Khusus 140 kali.
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar Bagi Alat Kelengkapan DPRD sebanyak 8 orang selama 12 Bulan	Penyediaan Kelompok Pakar Bagi Alat Kelengkapan DPRD sebanyak 8 orang selama 12 Bulan	Penyediaan Kelompok Pakar Bagi Alat Kelengkapan DPRD sebanyak 8 orang selama 12 Bulan	Penyediaan Kelompok Pakar Bagi Alat Kelengkapan DPRD sebanyak 8 orang selama 12 Bulan
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 6 orang untuk 6 Fraksi selama 12 Bulan	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 6 orang untuk 6 Fraksi selama 12 Bulan	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 6 orang untuk 6 Fraksi selama 12 Bulan	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi sebanyak 6 orang untuk 6 Fraksi selama 12 Bulan
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Keluaran : 5 Dokumen. Kegiatan berupa Pelaksanaan Diskusi dengan masyarakat, insan pers dan LSM 1 Kali. Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh anggota DPRD kepada masyarakat sebanyak 4 kali	Keluaran : 5 Dokumen. Kegiatan berupa Pelaksanaan Diskusi dengan masyarakat, insan pers dan LSM 1 Kali. Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh anggota DPRD kepada masyarakat sebanyak 4 kali	Keluaran : 5 Dokumen. Kegiatan berupa Pelaksanaan Diskusi dengan masyarakat, insan pers dan LSM 1 Kali. Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh anggota DPRD kepada masyarakat sebanyak 4 kali	Keluaran : 5 Dokumen. Kegiatan berupa Pelaksanaan Diskusi dengan masyarakat, insan pers dan LSM 1 Kali. Sosialisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan oleh anggota DPRD kepada masyarakat sebanyak 4 kali
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Keluaran : 3 Laporan. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota	Keluaran : 4 Laporan. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota	Keluaran : 5 Laporan. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota	Keluaran : 6 Laporan. Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		DPRD dalam Daerah sebanyak 3 Kali.	DPRD dalam Daerah sebanyak 4 Kali.	DPRD dalam Daerah sebanyak 5 Kali.	DPRD dalam Daerah sebanyak 6 Kali.
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Keluaran : 1 Dokumen. Dengan pelaksanaan rapat sebanyak 2 kali. Uraian belanja : Penyediaan ATK, kertas/cover, cetak, bahan computer, makan minum rapat dan perjalanan dinas.	Keluaran : 1 Dokumen. Dengan pelaksanaan rapat sebanyak 2 kali. Uraian belanja : Penyediaan ATK, kertas/cover, cetak, bahan computer, makan minum rapat dan perjalanan dinas.	Keluaran : 1 Dokumen. Dengan pelaksanaan rapat sebanyak 2 kali. Uraian belanja : Penyediaan ATK, kertas/cover, cetak, bahan computer, makan minum rapat dan perjalanan dinas.	Keluaran : 1 Dokumen. Dengan pelaksanaan rapat sebanyak 2 kali. Uraian belanja : Penyediaan ATK, kertas/cover, cetak, bahan computer, makan minum rapat dan perjalanan dinas.
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Keluaran : 3 Dokumen. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD sebanyak 3 kali.	Keluaran : 3 Dokumen. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD sebanyak 3 kali.	Keluaran : 3 Dokumen. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD sebanyak 3 kali.	Keluaran : 3 Dokumen. Pelaksanaan Reses Anggota DPRD sebanyak 3 kali.
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	-	Keluaran : 1 Dokumen. Penyusunan Kode Etik dan Tata Beracara DPRD serta belanja cetak Buku Kode Etik dan Tata Beracara sebanyak 150 buah	-	-
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah				
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Keluaran : 4 Dokumen. Uraian Belanja : Penyediaan bahan cetak untuk dokumentasi,	Keluaran : 4 Dokumen. Uraian Belanja : Penyediaan bahan cetak untuk	Keluaran : 4 Dokumen. Uraian Belanja : Penyediaan bahan cetak untuk	Keluaran : 4 Dokumen. Uraian Belanja : Penyediaan bahan cetak untuk

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

		pemeliharaan jaringan web site DPRD, honorarium tim redaksi majalah LEGISLASI, dan perjalanan dinas untuk peliputan berita selama 1 tahun	dokumentasi, pemeliharaan jaringan web site DPRD, honorarium tim redaksi majalah LEGISLASI, dan perjalanan dinas untuk peliputan berita selama 1 tahun	dokumentasi, pemeliharaan jaringan web site DPRD, honorarium tim redaksi majalah LEGISLASI, dan perjalanan dinas untuk peliputan berita selama 1 tahun	dokumentasi, pemeliharaan jaringan web site DPRD, honorarium tim redaksi majalah LEGISLASI, dan perjalanan dinas untuk peliputan berita selama 1 tahun
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Keluaran : 14 Dokumen Perjalanan Dinas Keluar Daerah Komisi, Panitia Khusus dan Study Banding DPRD sebanyak 14 Kali.	Keluaran : 15 Dokumen Perjalanan Dinas Keluar Daerah Komisi, Panitia Khusus dan Study Banding DPRD sebanyak 15 Kali.	Keluaran : 16 Dokumen Perjalanan Dinas Keluar Daerah Komisi, Panitia Khusus dan Study Banding DPRD sebanyak 16 Kali.	Keluaran : 17 Dokumen Perjalanan Dinas Keluar Daerah Komisi, Panitia Khusus dan Study Banding DPRD sebanyak 17 Kali.
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Keluaran : 1 Laporan. Pembuatan Laporan Kinerja DPRD sebanyak 150 Buku	Pembuatan Laporan Kinerja DPRD sebanyak 150 Buku	Pembuatan Laporan Kinerja DPRD sebanyak 150 Buku	Pembuatan Laporan Kinerja DPRD sebanyak 150 Buku
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Keluaran : 4 Dokumen. Pelaksanaan Rapat Paripurna sebanyak 4 kali yaitu : Rapat Paripurna HUT Lampung, LKPJ, HUT RI dan HUT Lampung Barat	Keluaran : 4 Dokumen. Pelaksanaan Rapat Paripurna sebanyak 4 kali yaitu : Rapat Paripurna HUT Lampung, LKPJ, HUT RI dan HUT Lampung Barat	Keluaran : 4 Dokumen. Pelaksanaan Rapat Paripurna sebanyak 4 kali yaitu : Rapat Paripurna HUT Lampung, LKPJ, HUT RI dan HUT Lampung Barat	Keluaran : 4 Dokumen. Pelaksanaan Rapat Paripurna sebanyak 4 kali yaitu : Rapat Paripurna HUT Lampung, LKPJ, HUT RI dan HUT Lampung Barat
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Keluaran : 10 Dokumen Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah sebanyak 10 Kali.	Keluaran : 12 Dokumen Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah sebanyak 12 Kali.	Keluaran : 13 Dokumen Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah sebanyak 13 Kali.	Keluaran : 14 Dokumen Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah sebanyak 14 Kali.

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini memuat tujuan perangkat daerah, sasaran strategis perangkat daerah dan indikator kinerja serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan selama periode 2023-2026 sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD dalam periode empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Dalam RPD Tahun 2023-2026 telah ditetapkan 5 (lima) tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran yang harus diwujudkan oleh semua perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang, dan kewenangan yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung, diukur serta digunakan sebagai dasar untuk melihat, melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah selesai kegiatan dan berfungsi.

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Lampung Barat, Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD
Tahun 2023-2026

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap tahun				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			Tahun 0	2023	2024	2025	2026	5
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	Point Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	95,00	95,00	95,50	96,00	96,50	96,50

Dari uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) pendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tersebut, apabila dapat tercapai, maka kondisi Kinerja akan terlaksana dengan baik.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang berisi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran strategi, indikator kinerja utama, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun RENJA selama periode tahun 2023-2026 guna meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini merupakan penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berkewajiban untuk mendukung pencapaian target renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur dan Bagian-bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dapat menjalin koordinasi dan

Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026
Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat

kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.

3. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 4 tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, hasil program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional dan atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstara sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 disusun agar Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mampu memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, Maret 2022
PLT. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

PIRWAN, SE., MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19690310 199803 1 006

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 yang berisi permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran strategi, indikator kinerja utama, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dalam menyusun RENJA selama periode tahun 2023-2026 guna meningkatkan layanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 ini merupakan penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, seluruh aparatur Sekretariat DPRD wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat berkewajiban untuk mendukung pencapaian target renstra dan melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat ini dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur dan Bagian-bagian di Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat dapat menjalin koordinasi dan

kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra dapat tercapai.

3. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 4 tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, hasil program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan ditingkat nasional dan atau daerah maka dapat dilakukan perubahan Renstara sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 disusun agar Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat mampu memberikan pelayanan prima terhadap pelaksanaan kegiatan DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 23 Maret 2022

PLT. SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,


PIRWAN, SE., MM
PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19690310 199803 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Raden Intan II Nomor 02 Way Mengaku – Liwa Telp (0728) 21112
LIWA 34811

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 050/ 12/KPTS/I.02/I/2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
TAHUN ANGGARAN 2023-2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2022, Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Tahun 2023-2026;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lampung Barat.

Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 06 tahun 1991, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kab. Lampung Barat;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD ;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;
8. Dokumen Pelaksana Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2022.
 2. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor : 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dijadikan pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2023-2026
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada tanggal : 23 Maret 2022


SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,
PIRWAN, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690310 199803 1 006

Tembusan ini disampaikan Kepada Yth,
1. Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)